

Penilaian *Liveable Settlement* di Pemukiman Pesisir Kabupaten Banyuwangi

Della Kusumaning Putri dan Hertiar Idajati

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

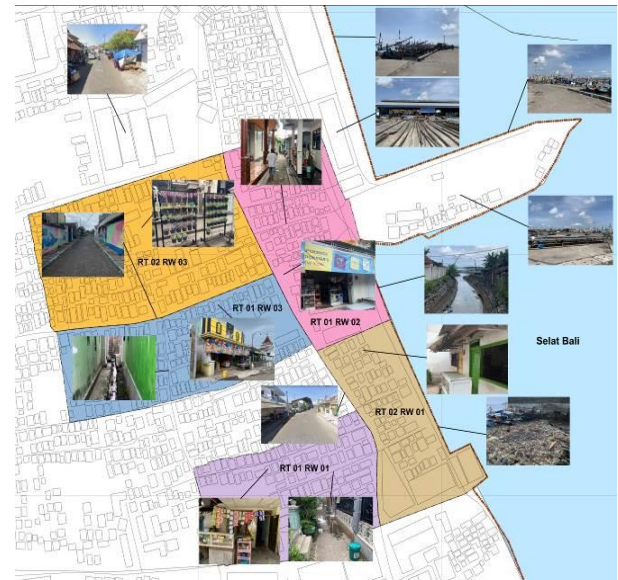
e-mail: hertiari_idajati@urplan.its.ac.id

Abstrak—Banyuwangi merupakan kabupaten yang berada di pesisir timur Pulau Jawa. Sehingga, 10 dari 25 wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi terletak di kawasan pesisir, salah satunya Kecamatan Muncar. Kawasan pesisir Kecamatan Muncar khususnya Dusun Kalimati yang berada di Desa Kedungrejo telah ditetapkan sebagai kawasan permukiman kumuh prioritas pertama Kabupaten Banyuwangi menurut Surat Keputusan Bupati tahun 2018 dan RP2KPKP tahun 2020. Namun, seiring banyaknya program permukiman kumuh yang telah digalakkan, status permukiman kumuh Desa Kedungrejo berganti menjadi permukiman tidak kumuh yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan Bupati tahun 2021. Perubahan kualifikasi tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk menilai apakah kondisi eksisting permukiman pesisir Dusun Kalimati Desa Kedungrejo sudah sesuai dengan konsep *liveable settlement* yang menjadi visi RP2KPKP Kabupaten Banyuwangi. Metode pengumpulan data yang digunakan yakni metode pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner dan observasi. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan output berupa persentase kondisi eksisting masing-masing sub variabel *liveable settlement*. Proses penilaian menggunakan 35 sub variabel *liveable settlement* yang dikelompokkan dalam 2 kategori, yakni sub variabel bersifat personal dan sub variabel bersifat publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 12 sub variabel personal, 2 diantaranya memiliki persentase kategori rendah terbanyak yaitu sistem pengolahan air limbah dan pendapatan per bulan masyarakat. Sedangkan dari 23 sub variabel publik, 9 diantaranya memiliki persentase kategori rendah terbanyak antara lain lebar jalan lingkungan, jenis drainase, ketersediaan proteksi kebakaran, jumlah RTH/taman publik, luas RTH/taman publik, radius jangkauan pelayanan SMP, ketersediaan angkutan umum, kegiatan sistem keamanan lingkungan, dan keaktifan organisasi nelayan.

Kata Kunci—Kawasan Pesisir, Konsep *Liveable Settlement*, Penilaian, Pemukiman Kumuh.

I. PENDAHULUAN

KAWASAN pesisir merupakan lokasi yang sangat strategis untuk sektor perekonomian, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan di kawasan tersebut. Lebih dari 14 juta masyarakat atau kurang lebih 7,5% dari total masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada kegiatan yang ada di kawasan pesisir [1]. Tidak heran jika masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan tersebut cenderung memilih kawasan pesisir sebagai tempat tinggal, yang pada akhirnya membentuk suatu kawasan permukiman untuk mendukung mata pencaharian dan kebutuhan hidupnya. Jumlah masyarakat Indonesia yang tinggal di pesisir mencapai 161 juta jiwa atau sekitar 60% dari 250 juta masyarakat Indonesia dan tersebar di 10.639 desa [2]. Namun pada umumnya, permukiman pesisir memiliki kondisi tempat tinggal yang kurang baik [3]. Alasannya karena permukiman di kawasan pesisir selalu identik dengan

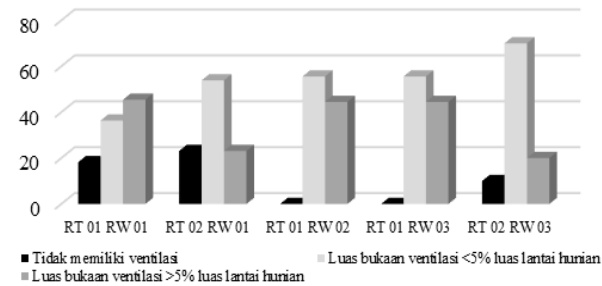


Gambar 1. Peta kondisi eksisting sub variabel *liveable settlement* di setiap RT.

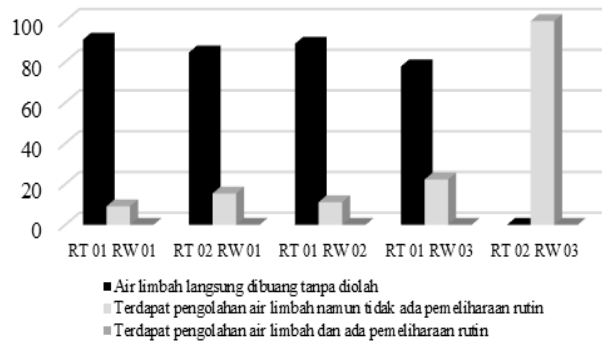
kondisi kumuh. Masalah permukiman kumuh di kawasan pesisir menjadi ukuran tingkat kualitas hidup yang rendah yang salah satunya dapat dilihat dari bentuk fisik permukiman. Permukiman kumuh identik dengan minimnya fasilitas, sarana dan prasarana serta dapat dikategorikan dalam rumah yang tidak layak huni [4].

Kondisi permukiman kumuh dan tidak layak huni terutama yang berada di kawasan pesisir timbul karena mata pencaharian masyarakat yang notabene sebagai nelayan memiliki kemampuan sumberdaya finansial yang rendah [5]. Secara langsung hal tersebut akan mengurangi perhatian masyarakat nelayan di dalam memperbaiki dan memelihara kualitas rumah. Permasalahan terkait permukiman kumuh dan tidak layak huni di kawasan pesisir, nyatanya juga dialami oleh Kabupaten Banyuwangi.

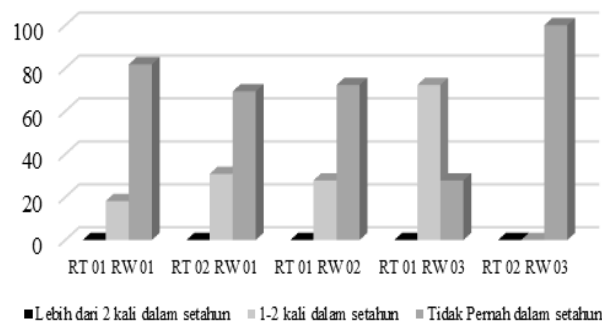
Menurut dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Banyuwangi tahun 2020, Kecamatan Muncar khususnya Desa Kedungrejo yang berada di pesisir Banyuwangi telah dinobatkan sebagai prioritas utama penanganan permukiman kumuh skala kabupaten [6]. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/159/KEP/429.011/2018, permukiman Desa Kedungrejo tergolong dalam kualifikasi kumuh B1/2 [7]. Artinya, permukiman di desa tersebut berada pada kondisi kumuh sedang dengan status kondisi tanah legal dan terdapat nilai pertimbangan lain yang tinggi yaitu berada di kawasan PPP Muncar. Permukiman kumuh tersebut, tepatnya berada Dusun Kalimati yang meliputi 5 RT yakni RT 01 RW 01, RT 02 RW 01, RT 01 RW 02, RT 01 RW 03, dan RT 02 RW 03.

Penghawaan/Ventilasi

Gambar 2. Persentase kondisi eksisting penghawaan/ventilasi.

Sistem Pengolahan Air Limbah

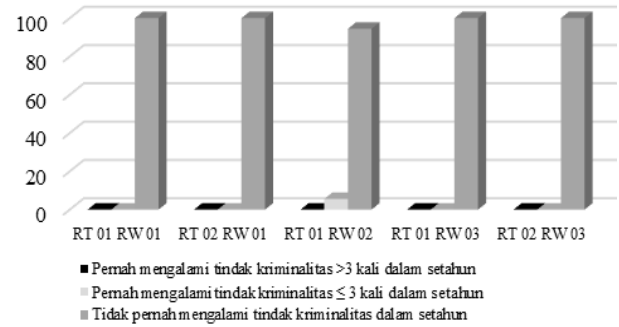
Gambar 3. Persentase kondisi eksisting sistem pengolahan air limbah.

Frekuensi Kejadian Genangan Air

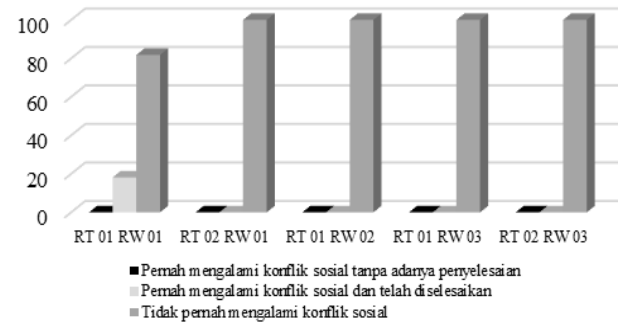
Gambar 4. Persentase kondisi eksisting frekuensi kejadian genangan air.

Kondisi permukiman kumuh Desa Kedungrejo menurut Dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018-2022, yaitu sebanyak 2.312 unit rumah dari 7.217 unit rumah dalam satu desa dinyatakan sebagai bangunan tidak teratur dan 519 unit rumah lainnya dinyatakan tidak layak huni [8]. Selanjutnya, terdapat permasalahan drainase yang tersumbat dan limpasan air hujan sehingga mengakibatkan daerah genangan seluas 1,59 Ha dengan frekuensi genangan lebih dari 1 kali dalam setahun. Kondisi tersebut nyata belum mampu mewujudkan visi penataan lingkungan permukiman Kabupaten Banyuwangi yakni “Permukiman Layak Huni dan Berkelanjutan”.

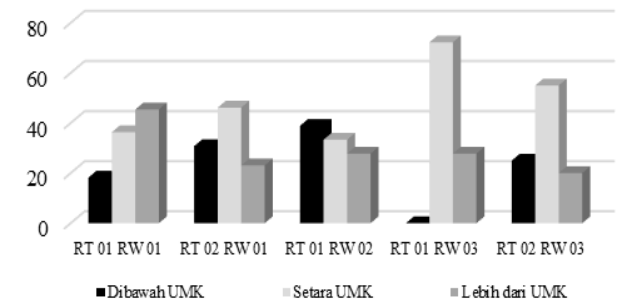
Guna mewujudkan visi tersebut, sejak tahun 2019 pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggalakkan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Desa Kedungrejo. Hingga tahun 2021, terdapat 3 program pencegahan permukiman kumuh dan 6 program peningkatan kualitas permukiman kumuh yang telah dilaksanakan di Desa Kedungrejo menurut RP2KPKP. Total anggaran biaya yang

Frekuensi Tindak Kriminalitas

Gambar 5. Persentase kondisi eksisting frekuensi tindak kriminalitas.

Konflik Masyarakat

Gambar 6. Persentase kondisi eksisting konflik masyarakat.

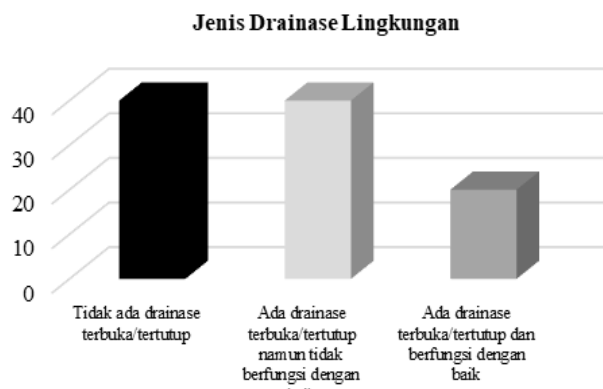
Pendapatan Per Bulan

Gambar 7. Persentase kondisi eksisting pendapatan per bulan.

dialokasikan untuk kedua program tersebut sebesar 4,8 Milyar yang bersumber dari APBD dan APBN [6].

Kedua program tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik pada perubahan kondisi permukiman pesisir Desa Kedungrejo, jika ditinjau dari Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/22/KEP/429.011/2021. Surat Keputusan tersebut menyatakan bahwa Desa Kedungrejo tidak lagi termasuk dalam kategori perumahan dan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Banyuwangi sejak tahun 2021 [9].

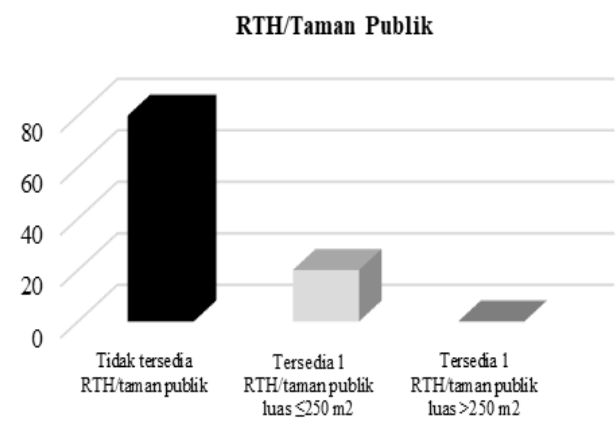
Perubahan kategori tersebut, menjadi dasar bagi peneliti untuk mengidentifikasi “Bagaimana kondisi eksisting permukiman kumuh Desa Kedungrejo berdasarkan konsep *liveable settlement* yang menjadi visi penataan lingkungan permukiman Kabupaten Banyuwangi?”. Analisis dalam penelitian ini merujuk pada preferensi penghuni yaitu masyarakat Desa Kedungrejo, khususnya Dusun Kalimati. Hal ini didasari oleh teori “*Good City Form*” dari Kevin Lynch, yang menyatakan bahwa suatu lokasi dinyatakan layak huni (*liveable*) apabila mampu mengakomodasikan kebutuhan masyarakat dalam hidup dan berkehidupan [10].



Gambar 8. Persentase kondisi eksisting jenis drainase lingkungan.



Gambar 9. Persentase kondisi eksisting jalan lingkungan.



Gambar 10. Persentase kondisi eksisting RTH/Taman Publik.



Gambar 11. Persentase kondisi eksisting keaktifan organisasi nelayan.

II. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah rasionalistik, yakni pendekatan yang berdasarkan atas fakta-fakta empiris dan teori yang berkaitan [11]. Fakta empiris dan teori dikumpulkan melalui literatur maupun dokumen yang relevan dan masih berlaku untuk memberikan pemaknaan serta pemahaman yang lebih rinci. Kemudian jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, yakni penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya.

B. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan 5 indikator, yaitu fisik, utilitas, fasilitas, sosial, dan ekonomi. Setiap indikator memiliki beberapa variabel yang dikerucutkan menjadi sub variabel. Sub variabel *liveable settlement* yang digunakan sebanyak 35 dan telah dikelompokkan menjadi 2 kategori, yakni sub variabel personal dan sub variabel publik. Sub variabel yang digunakan dalam penelitian disajikan pada Tabel 1.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di RT 01 RW 01, RT 02 RW 01, RT 01 RW 02, RT 01 RW 03, dan RT 02 RW 03 Dusun Kalimati Desa Kedungrejo yang berjumlah 381 KK. Sedangkan, metode sampling yang digunakan ada 2 yakni Probability Sampling yang berjenis teknik Stratified Radom Sampling untuk sub variabel personal dan Non-Probability Sampling yang berjenis Purposive Sampling untuk sub variabel publik. Pengkategorian tersebut dikarenakan sub variabel personal

akan menghasilkan jawaban yang berbeda tergantung kondisi yang dirasakan setiap responden. Sedangkan, sub variabel publik akan menghasilkan jawaban yang homogen dikarenakan sarana prasana yang digunakan sama.

Stratified random sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan suatu tingkatan pada elemen populasi. Elemen populasi dibagi menjadi beberapa tingkatan (stratifikasi) berdasarkan karakter yang melekat padanya. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan rumus slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Toleransi Kesalahan (dalam persen), penelitian ini menggunakan toleransi kesalahan 10%

$$n = \frac{381}{1 + (381 \times 0,01)} = 80 \text{ KK}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, didapatkan total sampling sebanyak 80 KK yang tersebar pada 5 wilayah RT. Menurut Stratified Random Sampling, setiap responden pada masing-masing RT memiliki proporsi sampling yang berbeda sesuai dengan jumlah penduduk. Maka, dilakukan penghitungan kembali menggunakan rumus Stratified Random Sampling setelah mendapatkan total responden untuk menghasilkan proporsi sampling pada masing-masing RT.

Tabel 1.
Variabel penelitian

Indikator	VARIABEL	Sub Variabel
Sub Variabel Personal		
Fisik	Kondisi Hunian	Kepadatan hunian
		Jenis bangunan
		Penghawaan/ventilasi
Utilitas	Jaringan Persampahan	Sistem jaringan persampahan
	Jaringan Air Limbah	Sistem pengolahan air limbah
	Jaringan Air Bersih	Kuantitas air bersih
Sosial	Jaringan Drainase	Kualitas air bersih
	Tingkat Kriminalitas	Jumlah kejadian genangan
	Hubungan Interaksi Antar Masyarakat	Frekuensi tindak kriminalitas
Ekonomi	Tingkat Pendapatan	Konflik masyarakat
	Aksesibilitas	Perdagangan per bulan
		Jarak hunian ke lokasi kerja
Sub Variabel Publik		
Utilitas	Jaringan Persampahan	Jarak bebas TPS dari hunian
	Jaringan Drainase	Jenis drainase
	Jaringan Jalan	Kondisi jalan lingkungan
Fasilitas	Proteksi Kebakaran	Lebar jalan lingkungan
	Ruang Terbuka Publik	Ketersediaan proteksi kebakaran
		Jumlah ruang terbuka publik
Fasilitas	Fasilitas Pendidikan	Luas ruang terbuka publik
	Fasilitas Kesehatan	Radius jangkauan pelayanan TK
	Fasilitas Transportasi	Radius jangkauan pelayanan SD
Sosial	Fasilitas Perbelanjaan	Radius jangkauan pelayanan SMP
		Radius jangkauan pelayanan SMA
		Radius jangkauan pelayanan posyandu
Sosial	Fasilitas Nelayan	Radius jangkauan pelayanan puskesmas pembantu
	Layanan Keamanan	Ketersediaan transportasi umum
	Hubungan Interaksi Antar Masyarakat	Radius jangkauan pelayanan toko/warung
		Ketersediaan pasar lingkungan
		Lokasi area penjemuran ikan
		Radius jangkauan pelayanan TPI
		Ukuran tambatan perahun
		Kapasitas dermaga perapatan perahu
		Intensitas kegiatan layanan keamanan
		Intensitas kegiatan sosial
		Keaktifan organisasi nelayan

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

Keterangan:

n_i = Ukuran Sampel i

N_i = Ukuran Populasi i

N = Ukuran Populasi Total

n = Ukuran Sampel Total

Berdasarkan rumus tersebut, kemudian didapatkan hasil proporsi sampling pada setiap RT yang disajikan pada Tabel 2.

Sedangkan, Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan ini misalnya orang tersebut dianggap yang paling mengerti apa tujuan dari penelitian ini, dan orang tersebut bertindak sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah objek/situasi sosial yang diteliti [12]. Pihak yang terpilih sebagai responden Non-Probability Sampling adalah seluruh ketua RT pada 5 wilayah lokasi studi, antara lain ketua RT 01 RW 01, RT 02 RW 01, RT 01 RW 02, RT 01 RW 03, RT 02 RW 03.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer, yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan observasi. Kuesioner disebarikan kepada masyarakat Dusun Kalimati yang bertempat tinggal di RT 01 RW 01, RT 02 RW

01, RT 01 RW 02, RT 01 RW 03, dan RT 02 RW 03 sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditentukan pada masing-masing RT.

E. Mengidentifikasi Kondisi Eksisting Sub Variabel Liveable Settlement Pada Permukiman Pesisir Desa Kedungrejo Berdasarkan Preferensi Penghuni

Identifikasi kondisi eksisting sub variabel *liveable settlement* pada permukiman pesisir Desa Kedungrejo berdasarkan preferensi penghuni, menggunakan metode pengumpulan data primer berupa penyebaran kuesioner dan observasi. Penggunaan metode pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner dan observasi, berdasarkan pengelompokan sub variabel penelitian. Dari 35 sub variabel yang digunakan, 12 diantaranya termasuk dalam kelompok sub variabel personal dan 23 sisanya termasuk dalam kelompok sub variabel publik.

Penyebaran kuesioner digunakan untuk mengetahui kondisi eksisting sub variabel *liveable settlement* yang bersifat personal, sehingga setiap responden memiliki jawaban beragam. Sedangkan, observasi digunakan untuk mengetahui kondisi eksisting sub variabel *liveable settlement* yang bersifat publik. Hasil observasi kemudian divalidasi melalui penyebaran kuesioner kepada ketua RT 01/01, 02/01, 01/02, 01/03, dan 02/03.

Hasil kuesioner dan observasi akan diolah secara kuantitatif menggunakan teknik analisis statistik deskriptif, untuk

Tabel 2.
Proporsi sampling pada setiap RT

Wilayah Penelitian	Proporsi Responden (KK)
RT 01 RW 01	11
RT 02 RW 01	13
RT 01 RW 02	18
RT 01 RW 03	18
RT 02 RW 03	20
Total	80

menghasilkan persentase kondisi eksisting dari masing-masing sub variabel. Statistik deskriptif atau statistik deduktif adalah bagian dari statistik mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami [13]. Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena. Dengan kata lain, statistik deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Penarikan kesimpulan pada statistik deskriptif (jika ada) hanya ditujukan pada kumpulan data yang ada. Didasarkan pada ruang lingkup bahasannya statistik deskriptif mencakup :

1. Distribusi frekuensi beserta bagianbagiannya seperti :
 - a. Grafik distribusi (histogram, poligon frekuensi, dan ogif)
 - b. Ukuran nilai pusat (rata-rata, median, modus, kuartil dan sebagainya)
 - c. Ukuran dispersi (jangkauan, simpangan rata-rata, variasi, simpangan baku, dan sebagainya)
 - d. Kemencengan dan keruncingan kurva.
2. Angka indeks.
3. Times series/deret waktu atau berkala.
4. Korelasi dan regresi sederhana.

Jenis teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif harus sesuai dengan jenis data atau variabel berdasarkan skala pengukurannya, yaitu nominal, ordinal, atau interval/rasio. Dalam sasaran ini, skala pengukuran yang digunakan oleh peneliti adalah ordinal.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Desa Kedungrejo memiliki luas $\pm 10.351,57$ Ha yang terdiri dari 5 dusun yakni Dusun Krajan, Dusun Kalimati, Dusun Muncar, Dusun Sampangan, dan Dusun Stoplas. Dusun Krajan memiliki 5 RW dan 79 RT, Dusun Kalimati memiliki 5 RW dan 20 RT, Dusun Muncar memiliki 5 RW dan 17 RT, Dusun Sampangan memiliki 3 RW dan 12 RT, Dusun Stoplas memiliki 4 RW dan 15 RT.

Dari 5 dusun yang ada, Dusun Kalimati adalah salah satu dusun yang memiliki nilai strategis kawasan lebih tinggi dibandingkan dusun lain karena lokasi sangat strategis dekat dengan kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar. Aktivitas di PPP Muncar, ternyata mempengaruhi kondisi kawasan permukiman di sekitarnya, terutama pada RT 01 RW 01, RT 02 RW 01, RT 01 RW 02, RT 01 RW 03, dan RT 02 RW 03. Hingga tahun 2018, permukiman di sekitar PPP Muncar termasuk dalam kawasan kumuh B1/2 dan menjadi prioritas pertama Kabupaten Banyuwangi.

Namun masuknya program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh pada tahun 2019, membuat perubahan yang sangat signifikan terhadap kondisi kawasan

permukiman Dusun Kalimati saat ini, terutama dari segi fisik, utilitas, fasilitas, sosial, dan ekonomi. Berikut ini adalah Beberapa gambaran kondisi eksisting kawasan permukiman Dusun Kalimati Desa Kedungrejo dapat dilihat pada gambar 1.

B. Identifikasi Kondisi Eksisting Sub Variabel *Liveable Settlement* Pada Permukiman Pesisir Desa Kedungrejo Berdasarkan Preferensi Penghuni

Proses identifikasi kondisi eksisting setiap sub variabel *liveable settlement* pada permukiman Desa Kedungrejo, dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dari setiap RT yang berjumlah 80 KK. Jawaban kuesioner selanjutnya diolah menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dengan *output* berupa persentase kondisi eksisting setiap sub variabel pada masing-masing RT. Sebelumnya, 35 sub variabel *liveable settlement* yang digunakan telah dibagi menjadi 2 kategori yakni sub variabel yang bersifat personal dan bersifat publik.

Sub variabel *liveable settlement* yang bersifat personal dari setiap RT, memiliki persentase kondisi eksisting yang beragam. Pada indikator fisik, kepadatan hunian dan jenis bangunan berada dalam kategori baik pada setiap RT. Sedangkan, penghawaan/ventilasi hunian memiliki luas bukaan yang berbeda-beda namun secara keseluruhan didominasi oleh luas bukaan lebih dari 5% dari luas lantai hunian dengan persentase lebih dari 50% pada masing-masing RT. Persentase kondisi eksisting penghawaan/ventilasi dapat dilihat pada gambar 2.

Indikator selanjutnya adalah utilitas dengan 5 sub variabel personal. Sub variabel sistem pengangkutan sampah, kuantitas air minum, dan kualitas air minum berada pada kategori yang baik dan sesuai dengan harapan masyarakat di setiap RT. Sedangkan, sistem pembuangan air limbah di setiap RT yang dapat dilihat pada gambar 3 bahwa sistem pengolahan air limbah berada pada kategori buruk kecuali RT 02 RW 03 dan frekuensi kejadian genangan air di beberapa RT berdasarkan gambar 4 dapat dilihat bahwa berada pada kategori buruk, lebih dari 70% responden di setiap RT membuang air limbah rumah tangga secara langsung tanpa diolah melalui saluran drainase lingkungan, untuk kemudian dialirkan ke sungai dan laut. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penyebab drainase tidak berfungsi dengan baik dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Sebanyak 60% lebih responden di setiap RT tidak mengalami kejadian genangan air, kecuali di RT 01 RW 03. Kondisi tersebut terjadi saat hujan lebat turun.

Untuk seluruh sub variabel personal pada indikator sosial, yakni frekuensi tidak kriminalitas dan konflik masyarakat 100% berada pada kategori baik. Meskipun pernah terjadi tindak kriminalitas dan konflik antar masyarakat, namun bukan merupakan kejadian berat. Lingkungan hunian termasuk dalam kategori aman karena tidak pernah terjadi tindak kriminalitas dan konflik masyarakat yang berarti di setiap RT. Persentase kondisi eksisting frekuensi tindak kriminalitas dapat dilihat pada gambar 5, sedangkan untuk persentase kondisi eksisting konflik masyarakat dapat dilihat pada gambar 6.

Selanjutnya, kondisi eksisting sub variabel personal pada indikator ekonomi cenderung beragam teruma pada pendapatan yang disajikan pada gambar 7. Mata pencaharian

masyarakat pada 5 RT yang menjadi wilayah penelitian didominasi oleh nelayan dan wirausaha bidang perikanan dengan pendapatan yang tidak menentu tergantung iklim dan cuaca. Sehingga, lebih dari 15% responden di setiap RT memiliki pendapatan di bawah UMK Banyuwangi 2021 (Rp2.314.278) dan lebih dari 30% responden di setiap RT memiliki pendapatan setara dengan UMK Banyuwangi 2021. Sedangkan, sub variabel aksesibilitas ke tempat kerja 100% berada pada kategori baik, yakni kurang dari 10 km.

Sub variabel *liveable settlement* yang bersifat publik dari setiap RT, juga memiliki persentase kondisi eksisting yang beragam. Pada indikator utilitas, hanya sub variabel jarak bebas TPS dari hunian yang 100% berada pada kategori baik yakni lebih dari 30 m. Sedangkan, untuk sub variabel drainase pada gambar 8 terlihat bahwa di setiap RT kondisi eksistingnya berbeda-beda, namun 40% adalah tidak tersedia jaringan drainase terbuka/tertutup di RT 01 RW 01 dan RT 01 RW 02 serta 40% tersedia drainase terbuka/tertutup namun tidak berfungsi dengan baik di RT 02 RW 01 dan RT 01 RW 03. Begitu pula dengan sub variabel kondisi jalan lingkungan yang berbeda di setiap RT, yaitu 40% adalah tidak tersedia jaringan drainase terbuka/tertutup di RT 01 RW 01 dan RT 01 RW 02 serta 40% tersedia drainase terbuka/tertutup namun tidak berfungsi dengan baik di RT 02 RW 01 dan RT 01 RW 03. Untuk persentase kondisi eksisting jalan lingkungan dapat dilihat pada gambar 9.

Kondisi eksisting sub variabel kondisi jalan lingkungan berbeda-beda. Jalan lingkungan di RT 01 RW 01 dan RT 02 RW 03 menggunakan perkerasan jenis paving dengan kondisi yang baik, tidak bergelombang dan tidak rusak. Untuk RT 02 RW 01 juga menggunakan perkerasan jalan jenis paving dengan kondisi cukup baik namun masih ditemui kondisi berlubang dan rusak di beberapa titik. Sedangkan, RT 01 RW 02 dan RT 02 RW 03 memiliki kondisi jalan yang rusak, bergelombang, dan banyak lubang. Lalu, sub variabel lebar jalan lingkungan dan proteksi kebakaran 100% berada pada kategori kurang baik, yakni lebar jalan kurang dari 3,2-4 m dan tidak adanya APAR di masing-masing RT.

Pada indikator fasilitas, sub variabel publik jumlah dan RTH/taman publik didominasi oleh kategori rendah dengan 80% wilayah penelitian tidak memiliki RTH/taman publik dan hanya 20% wilayah penelitian yang memiliki RTH/taman publik yaitu RT 02 RW 03, hal tersebut dapat dilihat pada gambar 10. RTH/taman publik berupa vertical garden yang memanfaatkan beberapa lahan warga dan masjid. Kemudian untuk radius jangkauan pelayanan TK kurang dari 500 m², SD kurang dari 1000 m², dan SMA kurang dari 3000 m² sehingga 100% berada pada kategori baik. Sedangkan radius jangkauan pelayanan SMP 100% berada pada kategori buruk yaitu lebih dari 1000 m². Radius jangkauan pelayanan puskesmas, posyandu, toko/warung, dan pasar lingkungan 100% berada pada kategori baik.

Untuk sub variabel ketersediaan angkutan umum berada pada kategori kurang baik, yakni tersedia angkutan umum namun jarang dijumpai. Angkutan umum yang tersedia berupa becak dan hanya digunakan oleh masyarakat nelayan atau wirausaha untuk mengangkut barang. Masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi untuk mobilitas sehari-hari. Pada fasilitas nelayan, sub variabel lokasi area penjemuran ikan, radius jangkauan pelayanan TPI, ukuran tambatan perahu dan kapasitas dermaga perapatan perahu 100% berada pada

kategori baik dan memenuhi persyaratan. Seluruh fasilitas nelayan berada di dalam kawasan PPP Muncar, sehingga tidak mengganggu kegiatan di kawasan permukiman masyarakat.

Selanjutnya pada indikator sosial, sub variabel publik yaitu kegiatan siskamling hanya diadakan oleh 40% wilayah penelitian pada RT 02 RW 01 serta RT 02 RW 03 dan hanya dilakukan saat momen-momen tertentu seperti bulan Ramadhan. Kemudian, untuk intensitas kegiatan sosial di setiap RT 100% berada pada kategori baik dengan intensitas kegiatan minimal 1 kali seminggu berupa kegiatan pengajian, PKK, kerja bakti, dsb. Sedangkan, pada gambar 11 terlihat bahwa untuk keaktifan organisasi nelayan 100% berada pada kategori buruk karena organisasi/kelompok nelayan Desa Kedungrejo tidak pernah melakukan pertemuan dan mengadakan kegiatan bersama. Sehingga, tidak ada wadah bagi nelayan untuk tumbuh dan berkembang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Identifikasi kondisi eksisting permukiman pesisir Desa Kedungrejo bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau ketercapaian konsep *liveable settlement* sebagai visi penataan lingkungan permukiman Kabupaten Banyuwangi. Proses identifikasi menggunakan 35 sub variabel *liveable settlement* yang dikelompokkan menjadi 2 kategori, yakni 12 sub variabel yang bersifat personal dan 23 sub variabel yang bersifat publik. Hasilnya, dari 12 sub variabel *liveable settlement* yang bersifat personal, 2 diantaranya yakni sistem pengolahan air limbah dan pendapatan per bulan masyarakat memiliki nilai persentase kondisi eksisting yang tinggi pada kategori rendah dan belum sesuai dengan harapan masyarakat. Sedangkan, dari 23 sub variabel *liveable settlement* yang bersifat publik, 9 diantaranya yakni lebar jalan lingkungan, jenis drainase, ketersediaan proteksi kebakaran, jumlah RTH/taman publik, luas RTH/taman publik, radius jangkauan pelayanan SMP, ketersediaan angkutan umum, kegiatan sistem keamanan lingkungan, dan keaktifan organisasi nelayan juga memiliki nilai persentase kondisi eksisting yang tinggi pada kategori rendah dan belum sesuai dengan harapan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Khoirunnisak, & Satria, A. 2016. Analisis kelembagaan dan keberlanjutan sebagai model pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat. *jurnal sSosiologi pedesaan*, 1(1), 23–37.
- [2] Widayatun. 2016. Satu dekade pembangunan sumber daya manusia (Kasus Pulau Mapur, Kabupaten Bintan). *Jurnal Kependudukan*, 11(2), 119–132.
- [3] Maharani, H., & Nurlaili, N. 2018. Tata Kelola Pemukiman Nelayan di Wilayah Perkotaan Pesisir Utara Jakarta. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 4(1), 7–13. <https://doi.org/10.15578/marina.v4i1.2048>
- [4] Pradika, E., & Sunarti, S. 2014. Pengaruh pembangunan rusunawa Kyai Mojo sebagai alternatif penanganan permukiman kumuh pesisir di Kelurahan Jobokuto Kabupaten Jepara. *Jurnal Tekno Global*, 3(1), 43–55.
- [5] Christiawan, P. I., Ananda Citra, I. P., & Arie Wahyuni, M. 2016. Penataan permukiman kumuh masyarakat pesisir di desa sangsit. *Jurnal Widya Laksana*, 5(2), 52–59. <https://doi.org/10.23887/jwl.v5i2.8494>
- [6] Bupati Banyuwangi. 2020. Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Banyuwangi.
- [7] Bupati Banyuwangi. 2018. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/ 159/ KEP/ 429.011/ 2018 Tentang Penetapan Lokasi

- Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Banyuwangi.
- [8] Bidang Cipta Karya. 2018. Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018-2022. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi.
- [9] Bupati Banyuwangi. 2021. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/22/KEP/429.011/2021 Tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Banyuwangi.
- [10] Lynch, Kevin. 1981. *A Theory of Good City Form*. Inggris: The MIT Press.
- [11] Muhadjir, N. 2011. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- [12] Yoanda, Y. 2017. Pelaksanaan pemberian izin lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2012 oleh badan lingkungan hidup di Kota Pekanbaru tahun 2016. JOM FISIP, 4(2), 1–18. <https://doi.org/10.4135/9781849209403.n73>
- [13] Fajri, L., Sugiarto, S., Anggraini, R., Sipil, M. T., Kuala, S., Aceh, B., Sipil, J. T., Teknik, F., Kuala, U. S., & Aceh, B. 2019. Penerapan metode importance performance analysis untuk menganalisis kepentingan dan kepuasan penumpang terhadap kualitas pelayanan bus trans Koetaradja (Studi kasus: Koridor I Keudah – Darussalam). Jurnal Arsip Rekayasa Sipil Dan Perencanaan, 2(2), 164–173.